

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

#### 2.1 Kajian Pustaka

##### 2.1.1 Skeptisme Profesional

###### 2.1.1.1 Definisi Skeptisme Profesional

Untuk mengetahui skeptisme profesional secara lebih jelas, berikut ini terdapat beberapa definisi skeptisme profesional menurut para ahli, antara lain: Menurut Tuanakotta (2018:321) definisi skeptisme profesional adalah sebagai berikut:

“Skeptisme profesional adalah menyadari kemungkinan terjadi kecurangan yang bisa dilakukan manajemen, dengan senantiasa mempertanyakan bukti audit dan mempertahankan skeptisme profesional sepanjang periode penugasan terutama kewaspadaan serta menerapkan kehati-hatian”.

Menurut Menurut Arens, *et.al.* (2015:41) definisi skeptisme profesional adalah sebagai berikut:

“Skeptisme profesional yaitu sikap yang mencakup *questioning mind*, waspada terhadap kondisi yang dapat menunjukkan kemungkinan salah saji akibat kecurangan atau kesalahan, dan penilaian kritis atas bukti audit. Singkatnya, auditor tetap waspada terhadap kemungkinan adanya salah saji yang material apakah karena kecurangan atau kesalahan di semua perencanaan serta pelaksanaan audit”.

Sedangkan menurut Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suhayati (2010:42) definisi skeptisme profesional adalah sebagai berikut:

“Skeptisme profesional adalah sikap yang mencakup pikiran yang selalu mempertanyakan dan melakukan evaluasi kritis dibukti audit”.

Dari beberapa definisi di atas maka dapat dikatakan bahwa skeptisme profesional adalah suatu sikap auditor yang mencakup pikiran yang selalu mempertanyakan dan melakukan evaluasi bukti serta menyadari kemungkinan terjadi kecurangan yang bisa dilakukan manajemen, dengan cara mempertahankan skeptisme profesional sepanjang periode penugasan terutama kewaspadaan serta menerapkan kehati-hatian.

### 2.1.1.2 Indikator Skeptisme Profesional

Arens, *et.al.* (2015:172) menjelaskan beberapa indikator skeptisme profesional antara lain sebagai berikut:

1. *Questioning mindset* (pola pikir yang dipenuhi pertanyaan)  
Adalah disposisi untuk menyelidiki sejumlah hal yang dirasa meragukan
  - a. Menolak suatu pernyataan atau *statement* tanpa pembuktian yang jelas.
  - b. Mengajukan banyak pertanyaan untuk pembuktian akan suatu hal.
2. *Suspension of judgement* (menunda untuk mengeluarkan keputusan)  
Adalah karakter skeptis yang mengindikasikan seseorang butuh waktu lebih lama untuk membuat pertimbangan yang matang, dan menambahkan informasi tambahan untuk mendukung pertimbangan tersebut.
  - a. Membutuhkan informasi yang lebih lama.
  - b. Membutuhkan waktu yang lama namun matang untuk membuat suatu keputusan.
  - c. Tidak akan membuat keputusan jika semua informasi belum terungkap.
3. *Search for knowledge* (keingintahuan)  
Adalah karakter skeptis seseorang yang didasari oleh rasa ingin tahu (*curiosity*) yang tinggi.
  - a. Berusaha untuk mencari dan menemukan informasi baru.
4. *Self determination* (keteguhan hati)  
Adalah sikap seseorang untuk menyimpulkan secara objektif atas bukti yang sudah dikumpulkan.
  - a. Tidak langsung menerima atau membenarkan pernyataan dari orang lain.
  - b. Menekankan pada suatu hal yang bersifat tidak konsisten (*inconsistent*).

Berdasarkan penjelasan indikator skeptisme profesional di atas, penelitian ini menggunakan indikator *questioning mindset* (pola pikir yang dipenuhi

pertanyaan), *suspension of judgement* (menunda untuk mengeluarkan keputusan, *search for knowledge* (keingintahuan), dan *self determination* (keteguhan hati).

## 2.1.2 Independensi

### 2.1.2.1 Definisi Independensi

Untuk mengetahui independensi secara lebih jelas, berikut ini terdapat beberapa definisi independensi menurut para ahli, antara lain: Menurut Mulyadi (2013:26) definisi independensi adalah sebagai berikut:

“Independensi berarti sikap mental bebas dari pengaruh, tidak dikendalikan pihak lain, tidak tergantung pada pihak lain. Independensi juga berarti adanya kejujuran dalam diri auditor dalam mempertimbangkan fakta dan adanya pertimbangan yang objektif tidak memihak dalam diri auditor dalam merumuskan dan menyatakan pendapatnya”.

Menurut Arens, *et.al.* (2012:74) definisi independensi adalah sebagai berikut:

“Independensi adalah sudut pandang yang tidak bias dalam melakukan pengujian audit, evaluasi atas hasil pengujian dan penerbitan laporan audit. Independensi merupakan salah satu karakteristik terpenting bagi auditor dan merupakan dasar dari prinsip integritas dan objektivitas”.

Sedangkan menurut Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suhayati (2010:58) definisi independensi adalah sebagai berikut:

“Independen artinya tidak mudah dipengaruhi, dan netral. Auditor yang independen tidak dibenarkan memihak pada kepentingan siapapun, auditor yang menemukan akan adanya kecurangan akan terus mencari tahu dan mengungkapkan kecurigaannya tersebut demi mempertahankan independensinya. Auditor juga harus bersikap mempertahankan objektivitas, agar tidak berbenturan dengan kepentingan lain, sehingga independensi merupakan landasan pokok bagi profesi akuntan publik”.

Selanjutnya menurut Soekrisno Agoes (2012:34-35) pengertian independen bagi akuntan publik (eksternal auditor dan internal auditor) dibagi menjadi 3 (tiga) jenis independensi:

1. *Independent in appearance* (independensi dilihat dari penampilannya di struktur organisasi perusahaan).  
*In appearance*, akuntan publik adalah independen karena merupakan pihak luar perusahaan sedangkan internal auditor tidak independen karena merupakan pegawai perusahaan.
2. *Independent in fact* (independensi dalam kenyataan/dalam menjalankan tugasnya).  
*In fact*, akuntan publik seharusnya independen, sepanjang dalam menjalankan tugasnya memberikan jasa profesionalnya, bisa menjaga integritas dan selalu menaati kode etik profesionalnya, profesi akuntan publik, dan standar professional akuntan publik. Jika tidak demikian, akuntan publik *in fact* tidak independen. *In fact* internal auditor bisa independen jika dalam menjalankan tugasnya selalu mematuhi kode etik internal auditor dan jasa professional *practice framework of internal auditor*, jika tidak demikian internal auditor *in fact* tidak independen.
3. *Independent in mind* (independensi dalam pikiran).  
*In mind*, misalnya seorang auditor mendapatkan temuan audit yang memiliki indikasi pelanggaran atau korupsi atau yang memerlukan audit *adjustment* yang material. Kemudian dia berpikir untuk menggunakan *findings* tersebut untuk memeras *auditee* walaupun baru pikiran, belum dilaksanakan. *In mind* auditor sudah kehilangan independensinya. Hal ini berlaku baik untuk akuntan publik maupun internal auditor.

Dari beberapa definisi di atas maka dapat dikatakan bahwa independensi merupakan suatu sikap mental yang dimiliki seorang auditor yaitu bebas dari pengaruh, tidak dikendalikan pihak lain, tidak tergantung pada pihak lain. Auditor yang independen tidak dibenarkan memihak pada kepentingan siapapun, auditor yang menemukan akan adanya kecurangan akan terus mencari tahu dan mengungkapkan kecurigaannya tersebut demi mempertahankan independensinya. Auditor juga harus bersikap mempertahankan objektivitas, agar tidak berbenturan dengan kepentingan lain, sehingga independensi merupakan landasan pokok bagi profesi akuntan publik. Dengan demikian independensi merupakan salah satu

karakteristik terpenting bagi auditor dan merupakan dasar dari prinsip integritas dan objektivitas.

### 2.1.2.2 Indikator Independensi

Menurut konsep Soekrisno Agoes (2012:34-35) indikator independensi yaitu:

1. Lama hubungan dengan klien (*audit tenure*)  
Di Indonesia, masalah *audit tenure* atau masa kerja auditor dengan klien sudah diatur dalam keputusan Menteri Keuangan No.423/KMK.06/2002 tentang jasa akuntan publik. Keputusan menteri tersebut membatasi masa kerja auditor paling lama 3 tahun untuk klien yang sama, sementara untuk Kantor Akuntan Publik (KAP) boleh sampai 5 tahun.
2. Tekanan dari Klien  
Setiap auditor harus mempertahankan integritas dan objektivitas dalam menjalankan tugasnya dengan bertindak jujur, tegas, tanpa pretensi sehingga dia dapat bertindak adil, tanpa dipengaruhi tekanan atau permintaan pihak tertentu untuk memenuhi kepentingan pribadinya.
3. Telaah dari Rekan Auditor (*peer review*)  
*Peer review* adalah review oleh akuntan publik namun pada praktiknya di Indonesia *peer review* dilakukan oleh Departemen Keuangan yang memberikan izin prektek dan Badan Review Mutu dari profesi Institusi Akuntan Publik Indonesia (IAPI). Tujuan dari *peer review* adalah untuk menentukan dan melaporkan apakah KAP yang direview itu telah mengembangkan kebijakan dan prosedur yang memadai bagi kelima unsur pengendalian mutu dan mengikuti kebijakan serta prosedur tersebut dalam praktek. *Review* diadakan setiap 3 tahun dan biasanya dilakukan oleh KAP yang dipilih oleh kantor yang direview.
4. Pemberian Jasa Non-audit  
Pemberian jasa selain audit dapat menjadi ancaman potensial bagi independensi auditor karena manajemen dapat meningkatkan tekanan pada auditor agar bersedia mengeluarkan laporan yang dikehendaki oleh manajemen yaitu wajar tanpa pengecualian. Pemberian jasa selain jasa audit berarti auditor telah terlibat dalam aktivitas manajemen klien. Jika pada saat dilakukan pengujian laporan keuangan ditemukan kesalahan yang terkait dengan jasa yang diberikan auditor tersebut.

Berdasarkan penjelasan indikator independensi di atas, penelitian ini menggunakan indikator lama hubungan dengan klien (*audit tenure*), tekanan dari klien, telaah dari rekan auditor (*peer review*), dan jasa non-audit.

### 2.1.3 Kecurangan (*Fraud*)

#### 2.1.3.1 Definisi Kecurangan (*Fraud*)

Untuk mengetahui kecurangan (*fraud*) secara lebih jelas, berikut ini terdapat beberapa definisi kecurangan (*fraud*) menurut para ahli, antara lain: Menurut Amin Widjaja Tunggal (2016:1) definisi kecurangan (*fraud*) adalah sebagai berikut:

“Kecurangan didefinisikan sebagai konsep legal yang luas, kecurangan menggambarkan setiap upaya penipuan yang disengaja, yang dimaksudkan untuk mengambil aset atau hak orang atau pihak lain. Dalam konteks audit atau laporan keuangan, kecurangan didefinisikan sebagai salah saji laporan keuangan yang disengaja. Dua kategori yang utama adalah pelaporan keuangan yang curang dan penyalahgunaan aset”.

Definisi lain dari kecurangan (*fraud*) dikemukakan oleh Hery (2016:1) adalah sebagai berikut:

“Kecurangan menggambarkan setiap penipuan yang disengaja, yang dimaksudkan untuk mengambil aset atau hak orang atau pihak lain. Dalam konteks audit atas laporan keuangan. Kecurangan didefinisikan sebagai salah saji laporan keuangan yang disengaja. Dua kategori yang utama adalah pelaporan keuangan yang curang dan penyalahgunaan aset”.

Dari beberapa definisi di atas maka dapat dikatakan bahwa kecurangan (*fraud*) adalah setiap upaya penipuan yang disengaja, yang dimaksudkan untuk mengambil aset atau hak orang atau pihak lain. Dua kategori yang utama adalah pelaporan keuangan yang curang dan penyalahgunaan aset.

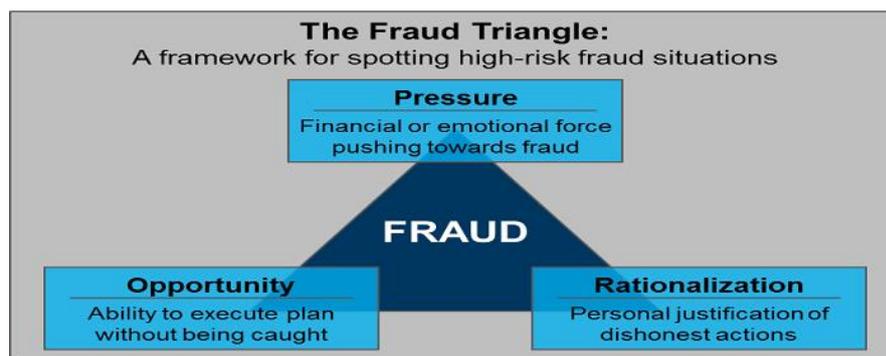
#### 2.1.3.2 Klasifikasi Kecurangan (*Fraud*)

Menurut Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suhayati (2010:64) mengklasifikasikan kecurangan (*fraud*) ke dalam dua kelompok utama yaitu:

1. Kecurangan laporan keuangan (*fraudulent financial reporting*) merupakan salah saji atau penghilangan secara sengaja jumlah atau pengungkapan dalam laporan keuangan, untuk mengelabui pemakai laporan keuangan, yang menyebabkan laporan keuangan menjadi menyesatkan secara material. Kecurangan ini mencakup tindakan seperti:

- a. Manipulasi, pemalsuan dan penggelapan data akuntansi dan dokumen pendukungnya yang menjadi sumber data bagi penyajian laporan keuangan.
  - b. Representasi yang salah atau hilangnya peristiwa, transaksi atau informasi yang signifikan.
  - c. Penerapan salah prinsip akuntansi yang disengaja, berkaitan dengan jumlah, klasifikasi, cara penyajian, atau pengungkapan.
2. Penyalahgunaan aset (*misappropriation of assets*) merupakan salah saji yang timbul dari pencurian aset entitas yang mengakibatkan laporan keuangan tidak disajikan sesuai prinsip akuntansi yang berlaku umum. Kecurangan ini mencakup tindakan:
- a. Penggelapan tanda terima barang/uang
  - b. Pencurian aset
  - c. Tindakan yang menyebabkan entitas harus membayar atas harga barang yang tidak diterima.

### 2.1.3.3 Faktor Pemicu Terjadinya Kecurangan



Gambar 2. 1  
Segitiga Kecurangan (*Fraud Triangle*)

Konsep Segitiga Kecurangan (*Fraud Triangle*) menurut Agoes (2012:375), menjelaskan terdapat *fraud triangle* yang berisi mengenai tiga kondisi penyebab terjadinya kecurangan, antara lain:

- a. Tekanan (*Pressure*)  
Tekanan merupakan situasi dimana seseorang merasa atau memiliki kebutuhan untuk melakukan kecurangan, pengaruh desakan dalam pikiran dan keinginan inilah yang menjadi kekuatan moral. Tekanan mengacu pada sesuatu yang telah terjadi di kehidupan pribadi pelaku yang menciptakan kebutuhan yang memotivasinya untuk melakukan kecurangan.
- b. Peluang (*Opportunity*)  
Peluang (*opportunity*) merupakan situasi dimana seseorang percaya adanya kemungkinan untuk melakukan kecurangan dan percaya bahwa

kecurangan tersebut tidak terdeteksi. Kecurangan yang disebabkan oleh peluang dapat terjadi karena pengendalian internal yang lemah, manajemen pengawasan yang kurang baik dan penggunaan posisi. Kegagalan dalam menetapkan prosedur yang memadai untuk mendeteksi kecurangan juga meningkatkan kesempatan terjadinya kecurangan.

c. Rasionalisasi (*Rationalization*)

Rasionalisasi merupakan kondisi dimana seseorang yang telah melakukan kecurangan mencari pembenaran atas perbuatannya, namun alasan tersebut tidak tepat. Rasionalisasi diperlukan agar pelaku dapat mencerna perilakunya yang melawan hukum untuk tetap mempertahankan jati dirinya sebagai orang yang dipercaya. Rasionalisasi merupakan bagian dari *fraud triangle* yang paling sulit untuk diukur. Bagi mereka yang umumnya tidak jujur, akan lebih mudah untuk merasionalisasi penipuan, dibandingkan dengan orang-orang yang memiliki standar moral yang tinggi.

#### 2.1.3.4 Pendeteksian Kecurangan (*Fraud*)

Menurut Kumaat (2011:156) definisi pendeteksian kecurangan (*fraud*) adalah sebagai berikut:

“Mendeteksi *fraud* adalah upaya untuk mendapatkan indikasi awal yang cukup mengenai tindak *fraud*, sekaligus mempersempit ruang gerak para pelaku *fraud* (yaitu ketika pelaku menyadari prakteknya telah diketahui, maka sudah terlambat untuk berkelit)”.

Sedangkan menurut Karyono (2013:91) definisi pendeteksian kecurangan (*fraud*) adalah sebagai berikut:

“Deteksi *fraud* adalah tindakan untuk mengetahui bahwa *fraud* terjadi siapa pelakunya, siapa korbannya, dan apa penyebabnya”.

Dari definisi-definisi di atas maka dapat dikatakan bahwa pendeteksian kecurangan (*fraud*) merupakan upaya atau tindakan untuk mengetahui bahwa terjadi adanya *fraud*, siapa pelakunya, siapa korbannya, dan apa penyebabnya. Mendeteksi kecurangan harus dilakukan agar tindak *fraud* dapat dicegah untuk tidak dilakukan, dan untuk mengetahui perlu tidaknya dilakukan pengujian.

### 2.1.3.5 Indikator Pendeteksian Kecurangan (*Fraud*)

Menurut Kumaat (2011:156) indikator pendeteksian kecurangan (*fraud*) adalah sebagai berikut:

1. Memiliki kemampuan mendeteksi kecurangan  
Auditor perlu memiliki keahlian dan pengetahuan yang memadai dalam mengidentifikasi terjadinya *fraud*. Pengetahuan tersebut meliputi karakteristik kecurangan, teknik atau modus yang digunakan untuk melakukan kecurangan, dan jenis kecurangan yang terkait dengan aktivitas yang ditinjau.
2. Memiliki sikap kewaspadaan yang tinggi  
Auditor perlu memiliki kewaspadaan yang tinggi terhadap peluang yang memungkinkan terjadinya *fraud*, seperti lemahnya pengendalian internal. Jika pengendalian internal lemah, maka perlu dilakukan pengujian tambahan oleh auditor yang diarahkan pada identifikasi indikator kecurangan lainnya. Seperti transaksi tidak sah, penyelewengan tanggung jawab, dan kerugian yang sangat besar.
3. Memiliki keakuratan  
Auditor perlu mengumpulkan bukti yang akurat atas indikator kecurangan yang mungkin terjadi, agar hasil yang dilaporkan pun tidak salah.
4. Memiliki kecermatan  
Auditor harus memutuskan apakah hasil tersebut memerlukan penyelidikan lebih lanjut atau tidak.

Berdasarkan penjelasan indikator pendeteksian kecurangan (*fraud*) di atas, penelitian ini menggunakan indikator memiliki kemampuan mendeteksi kecurangan, memiliki sikap kewaspadaan yang tinggi, memiliki keakuratan dan memiliki kecermatan.

## 2.2 Kerangka Pemikiran

### 2.2.1 Pengaruh Skeptisme Profesional terhadap Pendeteksian Kecurangan (*Fraud*)

Auditor harus memiliki skeptisme profesional atau sikap yang selalu curiga akan hal yang diamatinya. Kecurigaan tersebut tentunya akan membawa atau menimbulkan banyak pertanyaan yang kemudian mengarahkan pada penemuan

sebuah jawaban (Ajeng Wind, 2014:47-48). Skeptisme profesional yang rendah menumpulkan kepekaan auditor dalam mendeteksi kecurangan baik yang nyata maupun yang berupa potensi, atau terhadap tanda-tanda bahaya (*red flags, warning signs*) yang mengindikasikan adanya kesalahan (*accounting error*) dan kecurangan (*fraud*) (Tuanakotta, 2011:77). Oleh karena itu seorang auditor diharuskan untuk memiliki skeptisme profesional dalam proses audit untuk mempertimbangkan dan mengevaluasi kompetensi dari bukti audit yang sudah dikumpulkan secara objektif. Auditor tidak boleh mengasumsikan bahwa manajemen bersikap tidak jujur, akan tetapi kemungkinan mereka bersikap tidak jujur juga harus tetap dipertimbangkan. Pada saat yang sama auditor juga tidak boleh mengasumsikan bahwa manajemen tidak diragukan lagi kejujurannya, agar dapat mendeteksi apakah terjadi kecurangan di dalam sebuah perusahaan (Arens, *et.al.*, 2012:462).

Penelitian yang dilakukan oleh Arsendy (2017) menyatakan bahwa skeptisme profesional berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa auditor yang memiliki skeptisme profesional tinggi akan lebih dapat mendeteksi kecurangan dan sebaliknya jika seorang auditor yang memiliki skeptisme profesional yang rendah akan kurang dapat mendeteksi kecurangan. Penelitian tersebut juga didukung oleh Mokoagouw, dkk. (2018) yang menyatakan bahwa skeptisme profesional auditor berpengaruh secara signifikan terhadap kemampuan auditor eksternal dalam mendeteksi kecurangan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi skeptisme profesional yang dimiliki auditor, maka semakin tinggi

pula kemampuan auditor eksternal dalam mendeteksi kecurangan, sehingga kemungkinan terjadinya kecurangan juga semakin kecil.

### **2.2.2 Pengaruh Independensi Auditor terhadap Pendeteksian Kecurangan (*Fraud*)**

Independensi diperlukan oleh auditor dalam menjalankan proses audit, sehingga auditor harus bersikap netral dan tidak memihak kepada pihak lain. Independensi merupakan cerminan sikap yang tidak memihak serta tidak dibawah pengaruh atau tekanan dari pihak tertentu dalam mengambil keputusan dan tindakan (Agoes dan Ardana, 2009:146).

Agar dapat mendeteksi kecurangan, auditor harus independen dari setiap kewajiban atau independen dari pemilikan kepentingan dalam perusahaan yang diauditnya. Di samping itu, auditor tidak hanya berkewajiban memperhatikan sikap mental independen, tetapi ia harus pula menghindari keadaan-keadaan yang dapat mengakibatkan masyarakat meragukan independensinya (Mulyadi, 2013:27).

Auditor tidak hanya diharuskan untuk menjaga sikap mental independen dalam menjalankan tanggung jawabnya namun juga penting bagi para pengguna laporan keuangan untuk memiliki kepercayaan terhadap independensi auditor, jika auditor ragu dan tidak menjaga sikap mental independennya maka kemampuan auditor untuk mendeteksi kecurangannya rendah (Arens, *et.al.*, 2012:74). Ada lima faktor yang mengancam independensi, yaitu kepemilikan finansial yang signifikan, pemberian jasa nonaudit kepada klien, imbalan jasa audit, Tindakan hukum antara KAP dengan klien dan pergantian auditor (Arens, *et.al.*, 2012:75).

Penelitian yang dilakukan oleh Eka Sari (2019) menyatakan bahwa adanya pengaruh signifikan antara independensi terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan. Hal ini menunjukkan bahwa jika seorang auditor memiliki dan mempertahankan sikap independensi dalam setiap proses audit dan tidak akan mepedulikan adanya tekanan dari pihak lain maka auditor tersebut memiliki integritas yang tinggi. Sehingga semakin tinggi sikap independensi yang dimiliki auditor, maka semakin meningkat pula kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rivandi Bagas Bimantara (2018) yang menyatakan bahwa independensi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pendeteksian kecurangan. Pengaruh yang terjadi adalah pengaruh positif, dimana semakin tinggi nilai independensi yang dipegang oleh pemeriksa, maka semakin tinggi tingkat pendeteksian kecurangan.

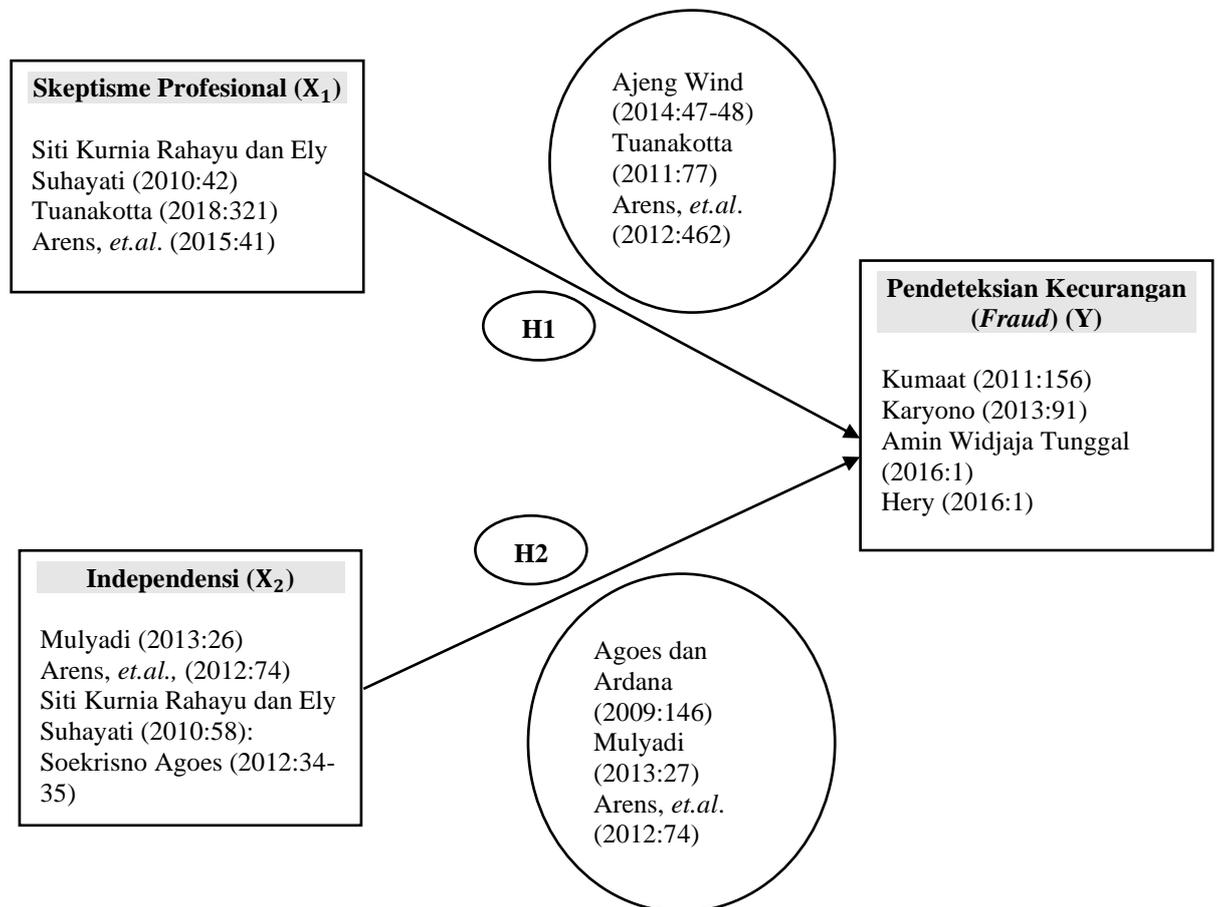
Penelitian-penelitian yang sebelumnya telah dilakukan dalam mendukung uraian di atas dirangkum peneliti dalam Tabel 2.1 dibawah ini:

**Tabel 2. 1**  
**Penelitian Terdahulu**

<b>Nama Peneliti &amp; Tahun</b>	<b>Judul Penelitian</b>	<b>Metode Penelitian</b>	<b>Hasil Penelitian</b>	<b>Perbedaan</b>
Muhammad Teguh Arsendy (2017)	Pengaruh Pengalaman Audit, Skeptisme Profesional, <i>Red Flags</i> , dan Tekanan Anggaran Waktu terhadap Kemampuan Auditor dalam Mendeteksi Kecurangan (Studi Empiris pada Kantor Akuntan Publik di DKI Jakarta).	Penelitian Kuantitatif dan model regresi linier berganda ( <i>multiple regression</i> ) dengan bantuan SPSS versi 16,0.	Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa skeptisme profesional berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan. Auditor yang memiliki skeptisme profesional tinggi akan lebih dapat mendeteksi kecurangan dan sebaliknya jika seorang auditor yang memiliki skeptisme profesional yang rendah akan kurang dapat mendeteksi kecurangan.	Perbedaannya dengan penelitian ini yaitu terdapat populasi, teknik pengambilan sampel, jumlah sampel, jumlah variabel X yang diteliti, dan metode analisis data.

<p>Monica Mokoagouw, Lintje Kalangi, Natalia Gerungai (2018)</p>	<p>Pengaruh Skeptisme Profesional dan Pengalaman Auditor terhadap Kemampuan Auditor Eksternal dalam Mendeteksi Kecurangan (Survei Pada Auditor Bpk Ri Perwakilan Sulawesi Utara).</p>	<p>Penelitian Kuantitatif dan model regresi linier berganda (<i>Multiple Regression Analysis</i>) dengan bantuan program Statistical Product and Service Solution (SPSS) versi 23.</p>	<p>Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa skeptisme profesional auditor (X1) berpengaruh secara signifikan terhadap kemampuan auditor eksternal dalam mendeteksi kecurangan (Y). Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi skeptisme profesional yang dimiliki auditor, maka semakin tinggi pula kemampuan auditor eksternal dalam mendeteksi kecurangan, sehingga kemungkinan terjadinya kecurangan juga semakin kecil.</p>	<p>Perbedaannya dengan penelitian ini yaitu terdapat pada populasi, Sampel, jumlah variabel X yang diteliti, dan metode analisis data.</p>
<p>Ni Putu Intan Eka Sari (2019)</p>	<p>Pengaruh Independensi, Kompetensi, <i>Red Flags</i> dan Tanggung Jawab Auditor terhadap Kemampuan Auditor dalam Mendeteksi Kecurangan.</p>	<p>Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode asosiatif Penelitian ini meneliti sampel yang diambil dari populasi dengan <i>purposive sampling</i>.</p>	<p>Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa adanya pengaruh signifikan antara independensi (X1) terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan (Y). Hal ini menunjukkan bahwa jika seorang auditor memiliki &amp; mempertahankan sikap independensi dalam setiap proses audit dan tidak akan mempedulikan adanya tekanan dari pihak lain maka auditor tersebut memiliki integritas yang tinggi. Sehingga semakin tinggi sikap independensi yang dimiliki auditor, maka semakin meningkat pula kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan.</p>	<p>Perbedaannya dengan penelitian ini yaitu terdapat pada populasi, sampel, jumlah variabel X yang diteliti, Teknik pengambilan sample dan metode analisis data.</p>
<p>Rivandi Bagas Bimantara (2018)</p>	<p>Pengaruh Independensi, Objektivitas, dan Pengalaman Pemeriksa Terhadap Pendeteksian Kecurangan</p>	<p>Penelitian Kuantitatif dan model regresi linier berganda (<i>Multiple Regression Analysis</i>).</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa independensi, memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pendeteksian kecurangan. Pengaruh yang terjadi adalah pengaruh positif, dimana semakin tinggi nilai independensi yang dipegang oleh pemeriksa, maka semakin tinggi tingkat pendeteksian kecurangan.</p>	<p>Perbedaannya dengan penelitian ini yaitu terdapat pada populasi, teknik pengambilan sampel, Jumlah sampel, jumlah variabel X yang diteliti metode analisis data.</p>

Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah diuraikan, maka dapat digambarkan paradigma penelitian sebagai berikut:



**Gambar 2. 2**  
**Paradigma Penelitian**

### 2.3 Hipotesis

Menurut Sugiyono (2017:99) mendefinisikan hipotesis adalah sebagai berikut:

“Hipotesis adalah kesimpulan sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan. Dikatakan sementara, karena kesimpulan yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data”.

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas maka dapat diajukan rumusan hipotesis sebagai berikut:

H1 : Skeptisme Profesional berpengaruh terhadap Pendeteksian Kecurangan

(*Fraud*).

H2 : Independensi berpengaruh terhadap Pendeteksian Kecurangan (*Fraud*).